

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Demokrasi saat ini sudah menjadi hal yang lumrah dan bisa dibilang sangat dibutuhkan dalam keadaan politik di berbagai negara di dunia saat ini. Semenjak gelombang demokratisasi melanda, negara – negara dunia ketiga kemudian menerapkan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan negara mereka. Demokrasi sendiri secara umum dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat, dai rakyat, dan untuk rakyat. Lebih dalam lagi menurut Scumpeter demokrasi dipandang sebagai sebuah mekanisme pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan – keputusan politik yang mana individu – individu yang berperan dalam demokrasi akan melakukan perjuangan memperebutkan suara rakyat dan memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan dan kebijakan.

Sejalan dengan Scumpeter, Robert Dahl juga menggagas dua dimensi teoritik yang dapat di pakai sebagai acuan untuk menyebut demokrasi, yaitu : (1) seberapa tingi tingkat kontestasi, kompetisi atau oposisi yang dimungkinkan, dan (2) seberapa banyak warga negara dapat memperoleh kesempatan berpartisipasi dalam kompetisi politik itu.¹ Selanjutnya Dahl juga menjelaskan bahwa suatu sistem pemerintahan yang demokratis harus memiliki kompetisi yang sungguh – sungguh dan meluas diantara individu dan kelompok organisasi terutama partai politik untuk memperebutkan jabatan – jabatan pemerintahan yang memiliki kekuasaan efektif dan tidak menggunakan paksaan dalam prosesnya. Selain itu suatu negara bisa dikatakan demokratis jika terdapat partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga negara dalam pemilihan pemimpin atau pembuatan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan umum yang diselenggarakan

¹ Mohtar Mas'ood, Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi (Yogyakarta: LP3ES, 1994)

secara berkala, adil, dan terbuka yang kemudian akan menghasilkan seorang pemimpin yang memang dikehendaki oleh rakyatnya.²

Dalam konstitusi Indonesia yang tertuang pada UUD 1945 pasal 28 yang menegaskan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan serta dijelaskan juga bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya dan juga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.³ Undang – undang tersebut merupakan cerminan dari negara demokrasi yang memberikan ruang seluas – luasnya kepada seluruh masyarakat untuk berkiprah, termasuk perempuan.⁴ Tetapi yang terlihat dalam kehidupan politik, peran dan posisi perempuan dipinggirkan.⁵ Hal tersebut sangat didukung oleh konstruksi sosial yang telah terbangun dalam masyarakat yang menganggap peran perempuan hanyalah dalam ranah domestik.

Perempuan dikonstruksi lemah, takut terhadap kejadian yang kasar, keras, dan mengerikan yang identik dengan politik maka perempuan akan semakin takut untuk berpolitik. Padahal, keputusan politik sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan bahkan sampai hal terkecil yang juga menyangkut masalah perempuan yang tidak akan bisa dimengerti oleh laki – laki. Maka sangat perlu peran perempuan sebagai bagian dari pegambil kebijakan untuk dapat menghasilkan kebijakan yang memihak perempuan dimana hal tersebut tidak akan sama jika diputuskan oleh laki – laki.

Politik dipandang sebagai institusi yang mempunyai peran paling dominan dalam membentuk struktur sosial. Hal tersebut karena dari lembaga ini peraturan maupun kebijakan dihasilkan. Keputusan di bidang lain pun dapat dikeluarkan

² Andi Yusran, *Demokrasi dan Demokratisasi*, dalam Jurnal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, Riau

³ UUD 1945

⁴ Ida Fauziyah, *Geliat Perempuan Pasca Reformasi*, (Yogyakarta : LKiS, 2015), hlm. 3

⁵ A. Nunuk P. Murniati, *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*, (Magelang : IndonesiaTera, 2004), hlm. 117

melalui lembaga ini, seperti keputusan lembaga ekonomi, sosial, bahkan lembaga agama dapat direkayasa melalui *politic will*. Oleh karena itu melihat bagaimana pentingnya peranan bidang politik dalam mempengaruhi struktur sosial maka posisi pengambil keputusan perlu diratakan kepada kaum perempuan.

Pemilu bisa dianggap sebagai suatu proses yang menghasilkan kepemimpinan baik di tingkat lokal dan nasional, selain itu pemilu juga bisa dijadikan indikator untuk mengukur kadar demokrasi sebuah sistem politik. Kadar demokrasi sebuah pemerintahan dipakai untuk mengukur ada tidaknya pemilu yang mengakui secara legal formal pemerintahan suatu negara, sedangkan nilai demokratis sebuah pemilu sendiri bisa dilihat dari tingkat kompetisi yang berjalan di dalamnya, semakin kompetitif pemilu berlangsung maka dapat dikatakan pemilu tersebut semakin demokratis.

Pemilu juga dapat dikatakan sebagai pilar demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sebagai alat legitimasi terhadap pemerintah dan sebagai penjaga nilai demokrasi sebuah negara. Banyak penyesuaian yang dilakukan demi menemukan formula pemilu terbaik seiring berjalannya waktu hingga saat ini dikarenakan kondisi Indonesia sebagai negara pluralis. Penyelenggaraan pilkada serentak dianggap lebih efisien dari segi anggaran maupun waktu, penghematan yang tentu akan menguntungkan bagi negara yang memang selama ini membiayai proses pemilu. Diharapkan dengan adanya pilkada serentak akan meningkatkan partisipasi politik rakyat sehingga kedaulatan benar – benar dirasakan oleh rakyat yang bebas menggunakan hak pilihnya sesuai dengan preferensi masing – masing tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Setelah diputuskan oleh MK bahwa pilkada selanjutnya akan diadakan secara serentak KPU mulai mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar secara bertahap sebanyak tiga kali. Tahap pertama akan dilaksanakan 9 Desember 2015 dengan melibatkan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Tahapan kedua akan digelar pada Februari 2017 di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota. Tahapan ketiga dilangsungkan pada 27 Juni 2018 dan melibatkan sebanyak 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, dimana tahapan proses pilkada ini telah

berlangsung 10 bulan sebelum tanggal pencoblosan. Dalam pilkada serentak yang berlangsung pada 27 Juni 2018, kabupaten Jombang menjadi salah satu pesertanya. Dari 3 pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati salah seorang diantaranya merupakan perempuan, yaitu Hj. Mundjidah Wahab yang pada saat itu berpasangan dengan Sumrambah sebagai wakilnya. Mundjidah Wahab merupakan petahana Wakil Bupati di periode sebelumnya yang berpasangan dengan Nyono Suharli yang kemudian pada pilkada 2018 yang lalu mereka memutuskan untuk berpisah dan berpasangan dengan orang lain. Dua pasangan lainnya yaitu Nyono Suharli – Subaidi Muchtar dan Syafiin – Choirul Anam, dimana Nyono Suharli merupakan Bupati petahana yang kemudian mencalonkan diri lagi menjadi Bupati di pilkada 2018 yang lalu.

Pilkada yang dilaksanakan serentak pada Juni 2018 yang lalu memang tidak dihiasi dengan wajah – wajah baru, dua calonnya merupakan petahana Bupati dan Wakil Bupati kembali lagi mencalonkan diri tetapi berbeda pasangan. Masyarakat yang merasa lebih familir dengan kedua sosok tersebut membuat persaingan menjadi ketat diantara Mundjidah dan Nyono. Latar belakang “Nyai” yang disandang Mundjidah Wahab menjadi menarik dalam kontestasi politik yang di dominasi oleh laki – laki. Selain itu Mundjidah Wahab juga mendobrak citra diri perempuan terlebih dari kalangan pondok yang dikenal akan budaya patriarkhinya yang kuat dan mengakar mampu bersaing bahkan memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Jombang yang mendapatkan julukan “Kota Santri” karena memiliki banyak pondok pesantren dan juga tradisi “*mondok*” yang masih sangat kental. Di dalam kondisi seperti itu bagaimanakah sosok Mundjidah Wahab berhasil memenangkan kursi Bupati Kabupaten Jombang akan sangat menarik untuk dibahas.

Dalam pilkada tahun 2018 Mundjidah Wahab – Sumrambah hanya di usung oleh 3 partai politik yang memiliki kursi di DPRD yaitu PPP dengan 4 kursi, Demokrat dengan 6 kursi, dan Gerindra dengan 2 kursi, selain itu Mundjidah juga didukung oleh 2 partai non-parlemen yaitu Perindo dan PSI. Hal tersebut berbanding terbalik dengan petahana Bupati Nyono Suharli dan Subaidi Muktar yang diusung

oleh 5 partai politik yang memiliki kursi di DPRD dengan total 27 kursi. Golkar yang menjadi partai utama dari Nyono sendiri memiliki 7 kursi lalu PKB yang merupakan partai dari Subaidi memiliki 8 kursi, PKS dengan 5 kursi, PAN dengan 3 kursi, dan Nasdem dengan 4 kursi. Dengan komposisi yang sebegitu kuat dan mendominasi dalam parlemen tidak serta merta dapat menjamin kemenangan Nyono dalam Pilkada Jombang 2018. Lalu pasangan Syafiin – Choirul Anam hanya didukung oleh 2 partai dalam parlemen yaitu PDIP dan Hanura serta 2 partai non parlemen yaitu PKPI dan PBB. Dimana PDIP merupakan partai pemenang di parlemen dengan 9 kursi dan Hanura 2 kursi. Dimana sebenarnya pasangan ini dua – duanya berasal dari PDIP, sedangkan Hanura hanya sebagai partai koalisi saja.

Dengan latar belakang Mundjidah Wahab yang berasal dari keluarga ulama perkembangan karir politik Mundjidah Wahab sangatlah menarik untuk di cermati. Beliau bisa dibilang merupakan politisi senior yang telah melalang buana di dunia politik mulai tahun 1990-an dengan menjabat sebagai anggota DPR beberapa periode hingga pada tahun 2012 beliau mencalonkan diri menjadi wakil bupati Jombang berpasangan dengan Nyono Suharli. Kemudian pada tahun 2018 beliau kembali mencalonkan diri sebagai calon Bupati Jombang berpasangan dengan adik mantan Bupati Jombang 2 periode yaitu Sumrambah dan terpilih sebagai Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang. Bagaimana strategi beliau dalam mendobrak hal tersebut dan juga jejaring apa saja yang dimiliki oleh pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah serta modalitas apa saja yang mendukung untuk bisa menghasilkan kemenangan dalam kontestasi pilkada 2018 tentunya sangat menarik untuk di ketahui lebih lanjut.

Dalam kasus pilkada Jombang tahun 2018 yang diwarnai oleh kasus OTT yang dialami oleh calon petahana Nyono Suharli menimbulkan berbagai dinamika yang tidak diprediksi sebelumnya akan terjadi dalam pilkada Jombang 2018. Perubahan peta dan arah politik di Jombang cukup membuat kepanikan bagi beberapa elit politik. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap isu yang berkembang selama proses pilkada berlangsung. Tidak dapat dipungkiri masalah *trust issue* menyerpa masyarakat setelah kasus OTT Nyono mencuat ke publik, calon

yang awalnya dipercaya dan populer di masyarakat mendadak tersangkut kasus penyuapan. Sehingga hal tersebut membuat masyarakat menjadi lebih kritis dalam memilih calon yang lain. Mundjidah Wahab dengan latar belakang yang jelas sangat diuntungkan dengan hal tersebut, selain itu beliau juga telah berhasil memperlihatkan kinerjanya selama menjabat menjadi Wakil Bupati. Dengan modalitas yang dimiliki oleh Mundjidah Wahab membuat masyarakat lebih melihat Mundjidah Wahab sebagai calon Bupati yang dirasa cocok.

Dalam meraih kemenangan dalam sebuah kontestasi pilkada sangat diperlukan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat yang akan menjadi pemilih dalam pilkada. Hal tersebut menjadi alasan mengapa ketokohan atau popularitas seorang figur sangat mempengaruhi tingkat dukungan yang akan diberikan masyarakat kepada calon tersebut. Terlebih jika calon tersebut merupakan sosok figur yang terpandang dan bersahaja serta memiliki kepercayaan dari masyarakat. Jika melihat hal tersebut maka sosok Mundjidah Wahab bisa dibilang merupakan sosok figur yang terpandang, dihormati, dan bersahaja. Hal tersebut tidak terlepas dari latar belakang beliau yang merupakan seorang bu Nyai dan merupakan putri dari K.H Wahab Hasbulloh yang merupakan pendiri NU dan juga merupakan pengasuh Ponpes Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Figur Mundjidah Wahab juga tidak bisa lepas dari ketokohan sang Ayah, sehingga banyak masyarakat Jombang menghormati beliau. Hal tersebut sedikit banyak mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap dirinya. Melihat hal tersebut bisa dikatakan Mundjidah Wahab memiliki modal sosial yang mumpuni untuk bisa bertarung dalam kontestasi pilkada terlepas dari fakta bahwa dirinya merupakan seorang perempuan.

Modal yang telah dimiliki oleh Mundjidah Wahab dan juga Sumrambah tentu sangat menunjang pertarungan mereka dalam kontestasi pilkada Jombang 2018. Modal sosial yang telah dimiliki juga merupakan jaringan yang terbangun solid sampai ke akar rumput. Jaringan tersebut tentu terbangun melalui ikatan emosional yang cukup erat. Dengan demikian akan lebih mudah bagi Mundjidah Wahab juga Sumrambah untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Melihat hal tersebut

menarik untuk mengetahui jaringan apa saja yang mendukung pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah dalam pilkada Jombang 2018. Kemudian bagaimana mereka dapat menggunakan jaringan yang telah mereka miliki untuk menjadi ujung tombak mereka untuk mendulang suara dalam pilkada.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Apa strategi yang di usung pasangan Mundjidah Wahab - Sumrambah dalam memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Jombang 2018 ?
2. Apa saja Modalitas yang dimiliki oleh pasangan Mundjidah Wahab – Sumrambah dalam pilkada Jombang 2018 ?
3. Jaringan – jaringan apa yang digunakan pasangan Mundjidah Wahab - Sumrambah untuk memenangkan kontestasi Pilkada Kabupaten Jombang 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana strategi kemenangan Mundjidah Wahab sebagai sosok aktor politik perempuan yang berkontestasi dalam pilkada Jombang 2018 juga bagaimana pasangan Munjidah Wahab dan Sumrambah menggalang dukungan untuk memihaknya dalam pilkada Jombang 2018
2. Untuk mengetahui apa saja modalitas yang dimiliki oleh Mundjidah Wahab dan Sumrambah yang menjadi faktor pendukung Mundjidah Wahab dan Sumrambah dalam meraih kemenangan pada Pilkada Jombang 2018
3. Untuk mengetahui jaringan apa saja yang digunakan untuk meraih kemenangan pasangan Munjidah Wahab dan Sumrambah dalam pilkada Jombang 2018

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menambah kajian dalam ilmu politik terutama pada pengetahuan di bidang sosial sekaligus bidang politik yang mana cakupan atau fokus utama bagaimana Munjidah Wahab bisa memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Jombang
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature maupun referensi yang dapat memberikan wawasan tambahan kepada pengetahuan dalam bidang kajian ilmu sosial dan ilmu politik.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Strategi Politik

Dalam setiap kompetisi dan kontestasi politik baik itu partai maupun kandidat secara personal pasti akan sangat membutuhkan strategi politik yang dimaksudkan untuk dapat memperoleh kemenangan, dimana strategi politik ini dimaksudkan untuk mendapatkan dukungan politik maupun masyarakat untuk memperoleh suara dalam kontestasi politik secara efektif dan efisien. Dalam setiap kompetisi politik yang diikuti jika partai politik atau kandidat tidak memiliki strategi yang tepat bukan hal tidak mungkin jika keunggulan – keunggulan yang dimiliki menjadi tidak berarti dan tidak efektif. Strategi politik kerap kali digunakan untuk mewujudkan sebuah cita – cita politik. Sedangkan strategi sendiri dapat diartikan sebagai kumpulan rencana untuk melakukan suatu tindakan.⁶ Bagaimana strategi ini disusun dan dilaksanakan sangat mempengaruhi hasil akhir dari suatu strategi itu sendiri, akankah berhasil atau malah gagal.

Dalam menjalankan suatu strategi untuk menyerang lawan dibutuhkan pengenalan terlebih dulu terhadap pihak lawan, jika tidak mengetahui lawan maka akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerapan strategi yang dilakukan. Penyerangan terhadap strategi lawan sendiri berarti secara terus menerus

⁶ Arnold Steinberg, *Kampanye Politik dalam Praktik*, PT Intermasa, 1981, hlm. 12.

mengganggu jalannya pelaksanaan strategi lawan yang kemudian membuat lawan akan kesulitan untuk merealisasikan strategi yang mereka miliki. Selain itu hubungan lawan dengan koalisi maupun basis jaringan atau kelompok masyarakat tertentu yang dimiliki harus direganggangkan dengan cara melakukan penawaran yang menarik. Hal – hal tersebut tidak berhasil dilakukan maka pertarungan di bidang politik harus dilakukan dengan mengangkat isu – isu atau tema yang merugikan pihak lawan maupun dengan cara merusak kredibilitas lawan dan merusak kepercayaan aliansi terhadap lawan.⁷ Strategi yang digunakan juga harus melihat daerah yang dijadikan sasarannya, jika daerah tersebut merupakan daerah kekuatan lawan maka tema dan isu yang diungkit tidak boleh yang menjadi kekuatan lawan.

Menurut Peter Schorder strategi politik merupakan strategi atau teknik yang digunakan untuk mewujudkan suatu cita – cita politik. Dimana strategi politik ini sendiri merupakan hal yang penting untuk sebuah partai, tanpa adanya strategi politik perubahan dan rencana jangka panjang akan sangat sulit untuk diwujudkan. Peter Schorder membagi strategi politik kedalam dua bagian yaitu, strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan).⁸ Strategi politik ofensif sendiri disini dimaksudkan dimana sebuah partai politik menggunakan strategi untuk meningkatkan jumlah pemilihnya atau perolehan suara yang diperoleh oleh partai politik maupun kandidat. Untuk melaksanakan strategi ini dibutuhkan sumber daya yang memiliki kesamaan visi dengan partai politik sehingga kampanye yang dijalankan akan berhasil. Dimana model strategi ini lebih menitikberatkan pada perbedaan – perbedaan yang jelas dan menarik antara suatu partai dengan partai yang lainnya dengan tujuan untuk menarik pemilih untuk beralih partai. Sementara strategi defensive yaitu ketika partai politik yang berkuasa atau koalisi pemerintahan ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika suatu partai politik ingin mempertahankan pangsa pasar politiknya. Selain itu strategi defensif juga

⁷ Toni Andriaanus Pito dkk, *Mengenal Teori – Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi* (Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), hlm 171.

⁸ Peter Schorder, *Strategi Politik*, Friederich Naumann Stiftung (Jakarta : 2003), hlm 103-104.

dapat muncul ketika pasar tidak akan dipertahankan lagi atau ditutup, dimana penutupan pasar ini diharapkan dapat memberikan keuntungan sebanyak mungkin.⁹

Menurut Peter Schroder strategi ofensif dibagi menjadi dua yaitu strategi untuk memperluas pasar (strategi persaingan) dan strategi untuk menembus pasar (strategi pelanggan). Sedangkan untuk strategi defensif sendiri menyangkut strategi untuk menembus pasar (strategi multiplikator) dan strategi untuk menutup pasar (strategi lingkungan sekitar). Bagi Schroder, strategi ofensif selalu dibutuhkan terutama jika suatu partai atau kandidat ingin menambah suara pemilih. Strategi ofensif ini selalu menitikberatkan pada memunculkan keunggulan – keunggulan partai dari partai lawan agar pemilih tertarik untuk beralih. Dalam strategi ini yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu dan keuntungan – keuntungan yang dapat diharapkan darinya. Dalam strategi perluasan pasar (strategi persaingan) dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, dalam kampanye pemilu dan dalam implementasi politik.

Dalam kampanye politik strategi ini dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Dengan begitu maka harus ada penawaran baru yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing. Maka akan diperlukan strategi persaingan faktual yang digunakan oleh partai – partai dalam sebuah kompetisi. Strategi semacam ini harus disampaikan melalui kampanye untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran yang lebih menarik dibandingkan dengan partai – partai lain. Berbeda lagi penerapan strategi dalam implementasi politik, dimana dalam cara ini produk baru yang ditawarkan adalah produk politik baru yang sudah dihasilkan atau akan dihasilkan dan lebih tepatnya keuntungan apa saja yang akan dihasilkan oleh produk politik tersebut. Maka diperlukan perancangan kemasan baru untuk produk politik yang lama agar menarik masyarakat dan dapat memperluas pasar dalam kampanye terbuka.

⁹ Ibid

Kemudian untuk strategi menembus pasar (strategi pelanggan) menurut Schorder bukan hanya masalah ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini pasif dengan memberikan penawaran yang lebih baik, tetapi lebih kepada penggalian potensi yang sudah ada secara lebih optimal. Bisa dikatakan strategi ini lebih menitikberatkan dalam penggalian potensi dalam suatu kelompok masyarakat atau daerah yang sudah dikuasai tetapi menambah target keberhasilannya yang telah diraih sebelumnya. Misal suatu partai sebelumnya memperoleh hasil 30% maka sekarang meningkatkan target menjadi 50% dengan lebih menggali potensi suara yang ada. Penggalian potensi tersebut juga dapat dilakukan dengan cara menggerakkan emosi kelompok yang ditargetkan dengan memanfaatkan keadaan tertentu atau dengan menciptakan musuh bersama. Kelompok yang menjadi target ini di tentukan melalui interpretasi keputusan strategis dengan melihat tujuan dan citra yang diinginkan.

Kemudian untuk strategi defensif sendiri Schroder mengatakan strategi ini akan muncul apabila suatu partai ingin mempertahankan mayoritasnya. Bagi Schroder strategi ini khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Hal yang biasa terjadi yaitu partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman yang dimiliki oleh pemilih musiman mereka. Pemerintah atau partai yang berkuasa biasanya berusaha mengaburkan keunggulan atau perbedaan yang ada pada partai oposisi yang menyerang sehingga membuat perbedaan atau keunggulan tersebut tidak terlihat. Strategi ini disebut sebagai strategi disinformasi, dimana sebenarnya strategi ini bisa diterapkan secara ofensif maupun defensif. Yang dimaksud dapat diterapkan secara defensif berarti strategi ini dipergunakan untuk menghadapi lawan.

Dalam penerapannya strategi ini memiliki dua titik tolak, *pertama* pemberian informasi yang salah (penipuan). Strategi ini dapat dipergunakan untuk menutup – nutupi informasi yang tidak menyenangkan dan juga dapat dipergunakan untuk menyingkirkan kerugian – kerugian strategis yang ada. *Kedua*, pemberian informasi secara berlebihan yang tidak dapat diperiksa kebenarannya lagi atau biasa disebut dengan banjir informasi. Dalam kasus ini disinformasi juga dapat

digunakan dalam strategi ofensif dengan mengangkat tema tertentu yang dipertimbangkan akan memiliki keuntungan strategis. Dengan menggunakan strategi banjir informasi ini diharapkan pemilih akan kebingungan dan tidak dapat mengenali keuntungan strategi yang ada, dimana dalam kasus ini strategi disinformasi merupakan titik tolak ofensif. Dalam strategi ini satu pihak sengaja menyebarluaskan informasi yang salah dengan tujuan agar masyarakat dan pihak lawan salah menginterpretasikan informasi yang berkembang. Strategi ini dipopulerkan oleh agen – agen rahasia yang biasanya menaikkan isu yang bertujuan untuk meningkatkan ketegangan politik dalam negeri untuk kemudian memperoleh keuntungan – keuntungan strategis dari hal tersebut.

Kebanyakan partai yang menggunakan strategi defensif yang ingin mempertahankan pasar akan mengambil sikap yang bertentangan dengan partai – partai yang menerapkan strategi ofensif. Perbedaan yang paling menonjol yaitu yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang berguna dan menarik, maka partai – partai yang menggunakan strategi defensif lebih menitikberatkan pada bagaimana keunggulan dan perbedaan tersebut tidak dikenali. Partai yang menerapkan strategi defensif mengutamakan hubungan yang baik dan terawat dengan aliansi atau konstituennya, pemeliharaan secara insentif dan berkala selalu dilakukan.

Kemudian untuk strategi menyerahkan pasar menurut Schroder dapat memiliki dua arti yang dapat dicontohkan dalam dua kasus yaitu, *pertama*, jika sebuah partai ingin menyerah dan dalam situasi tertentu ingin melebur dengan partai lain. *Kedua*, dalam pemilu yang menggunakan sistem balot (*ballotage*) ada tahap pemungutan suara kedua yang hanya diikuti oleh kandidat yang lolos ditahapan sebelumnya maka partai – partai yang tidak lolos ke tahap kedua seringkali menyerahkan pasarnya untuk sementara. Tetapi dalam kasus kedua jika memang terpaksa terjadi penyerahan pasar oleh satu partai harus diikuti dengan kejelasan ketidakikutsertaannya dengan memberikan alasan yang mendasar dan memberikan pilihan lain.¹⁰ Tetapi jika melakukan penyerahan pasar banyak hal

¹⁰ Toni Andriaanus Pito dkk, *Mengenal Teori – Teori Politik dari Sistem Politik sampai Korupsi* (Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia, 2019), hlm 176

harus diperhatikan terutama menyangkut pengalihan tugas dalam peleburan dan juga pengalihan anggota atau organisasi yang tersisa.

Strategi penyerahan pasar juga bisa dilakukan dengan melakukan penutupan pasar, dimana hal ini terjadi kebanyakan pada pemerintah. Hal tersebut tergambar dalam kasus berikut, yaitu dimana pemerintah menarik dirinya dalam suatu kegiatan yang awalnya dijalankan oleh negara. Misalkan dalam program privatisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dimana privatisasi tidak hanya merupakan penjualan atau penyerahan sebuah kegiatan, melainkan penyerahan pasar atau sebagian pasar yang memerlukan perencanaan strategi yang sesuai dengan aturan yang ada.

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Modalitas

Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokrasi secara prosedural dan substansial dan merupakan arena kompetisi politik antar pasangan calon dan pemenangnya ditentukan oleh perolehan suara terbanyak. Dalam demokrasi semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pemilihan Kepala Daerah. Tetapi dalam kenyataan kesempatan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Daerah berbeda bagi tiap orang, karena modal yang dimiliki setiap orang berbeda pula. Dalam kontestasi pemilu maka para kandidat calon Bupati dan wakilnya memerlukan kendaraan untuk bisa mengikuti kontestasi. Modalitas dalam kontestasi politik adalah modalitas selain peran figur, juga sangat ditentukan oleh peran dukungan politik dan ekonomi, dukungan dari elit – elit sosial politik dan ekonomi untuk dapat memenangkan pilkada.¹¹

Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul *The Forms of Capital* membedakan tiga bentuk modal yakni modal ekonomi, modal budaya, dan modal

¹¹ Tesis Stella Maria Ignisia, Tesis: “Modalitas dalam Kontestasi Politik: Studi Kasus tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu di Kota Bitung Sulawesi Utara Tahun 2010” (Semarang : UNDIP, 2012)

sosial. Menurut Bourdieu definisi modal sangatlah luas dan mencakup hal – hal material yang memiliki nilai simbolik, serta modal budaya yang didefinisikan sebagai selera bernilai budaya dan pola konsumsi. Bourdieu menganggap modal sebagai relasi sosial yang terdapat dalam suatu sistem pertukaran dalam bentuk materiil ataupun simbolik. Selain itu, Bourdieu juga memandang modal sebagai basis dominasi. Beragam jenis modal dapat ditukar dengan jenis modal lainnya, yang artinya modal memiliki sifat tukar. Penukaran dalam bentuk modal simbolik dianggap Bourdieu sebagai pertukaran modal paling hebat, sebab dalam bentuk ini modal yang berbeda dikenali sebagai sesuatu yang legitimate. Agar dipandang sebagai seseorang yang memiliki prestise seseorang harus diterima sebagai sesuatu yang legitimate.

Dalam proses pilkada yang dianggap sebagai arena kontestasi politik dengan memilih salah satu diantara calon yang mengajukan diri, maka calon yang kemungkinan dapat memenangkan pilkada adalah calon yang memiliki modalitas terbangun. Ada tiga modal utama yang harus dimiliki oleh calon ketika memutuskan untuk mengikuti kontestasi pilkada, yaitu modal politik, modal sosial, modal ekonomi. Pasangan calon Kepala Daerah akan memiliki peluang lebih besar ketika memiliki lebih dari satu akumulasi modal, semakin besar pasangan calon mengakumulasi tiga modal tersebut, maka akan semakin besar kesempatannya untuk memenangkan kontestasi pilkada. Peluang terpilihnya suatu kandidat dalam kontestasi pilkada merupakan suatu proses yang kompleks dan tidak bisa dihasilkan hanya dengan satu faktor atau modalitas tertentu.

Dalam setiap kontestasi pilkada akan diperlukan strategi yang berguna untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil akan mendatangkan keuntungan bagi pasangan calon. Oleh karena itu, dalam menetapkan strategi kemenangan dalam kontestasi pilkada tidak hanya menyesuaikan dengan kondisi dan dinamika yang terjadi dalam pilkada tersebut tetapi juga termasuk modalitas yang dimiliki oleh masing-masing pasangan calon yang berkompetisi. Modalitas saling berkaitan satu sama lain sehingga untuk memperbesar peluang masing – masing calon dalam kontestasi politik seperti pemilihan Kepala Daerah dibutuhkan tidak hanya modal sosial yang mumpuni tetapi juga dukungan politik dan ekonomi

yang mencukupi. Berikut adalah 3 (tiga) modalitas yang harus dimiliki oleh setiap calon yang akan maju dalam kontestasi pilkada, sebagai berikut :

a. Modal Politik

Dalam proses pencalonan seseorang untuk dapat mengikuti kontestasi pilkada maka calon tersebut memerlukan dukungan politik melalui partai politik. Partai politik sendiri berperan sebagai kendaraan yang membawa dan menaungi calon dalam proses pilkada, dimana menurut UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Daerah pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa seseorang yang akan mencalonkan diri dalam kontestasi pilkada harus didukung minimal 20% jumlah kursi di DPRD atau 25% akumulasi jumlah suara sah dalam pemilihan legislatif. Oleh karena itu peran modal politik bisa dibilang penting dalam kontestasi pilkada. Partai politik sendiri merupakan organisasi politik yang mengajukan kandidat dalam pilkada untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan.

Calon yang akan berkompetisi dalam pilkada akan berusaha semaksimal mungkin untuk menggalang koalisi dari sebanyak mungkin partai yang memiliki kursi di DPRD untuk mendukungnya. Namun karena hakikatnya kontestasi pilkada merupakan arena kompetisi antar calon secara personal, maka peran partai politik disini sebagai alat untuk memobilisasi dukungan relatif kecil. Sehingga bagi calon yang sangat ingin memenangkan kontestasi pilkada harus bisa memanfaatkan sebanyak mungkin jaringan organisasi politik untuk mendapatkan dukungan politik, karena sebenarnya dalam kontestasi pilkada kompetisi yang lebih menonjol adalah pada pengaruh figur calon.

Casey mendefinisikan modal politik sebagai pendayagunaan keseluruhan jenis modal yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau lembaga politik untuk menghasilkan tindakan politik yang menguntungkan dan memperkuat posisi pelaku politik atau lembaga politik yang bersangkutan.¹² Lebih lanjut, Casey merincikan adanya empat pasar politik yang berpengaruh pada besaran modal politik yang dimiliki oleh seorang pelaku politik atau lembaga politik.

¹² Kimberly Casey, *Defining Political Capital; a Reconsideration of Bordieu's Interconvertibility Theory*, University of Missouri-St. Louis, 2006

Pasar politik yang pertama adalah pemilu, hal tersebut karena pemilu merupakan instrumen dasar untuk memilih pemimpin dalam sistem demokrasi. Pasar yang kedua adalah perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik, kemudian pasar politik yang ketiga adalah dinamika hubungan dan konflik antara pelaku politik dan lembaga politik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan – kebijakan publik. Pasar politik yang keempat adalah pendapat atau pandangan umum (*public opinio*) mengenai pelaku atau lembaga politik.

Sementara itu modal simbolik dalam hubungannya dengan dinamika politik bisa dipahami sebagai besaran legitimasi, reputasi, dan tingkat penghormatan yang diperoleh oleh para pelaku politik ataupun lembaga – lembaga politik akibat tindakan – tindakan politik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukannya.¹³

Sedangkan ahli politik J.A. Booth dan P.B. Richard mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. A. Hick dan J. Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian atau sumber daya merealisasikan hal – hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau bisa berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Dalam pandangannya, Foucault mengatakan, kekuasaan terutama berarti kapasitas untuk melakukan atau menjadi hal – hal tertentu secara paripurna. Kekuasaan dipraktikan oleh individu atau sekelompok manusia ketika mereka saling berinteraksi. Penggunaan kekuasaan terdapat dalam penetapan aturan apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan dalam mengatur hasil yang mungkin muncul. Pemilu merupakan arena untuk melakukan mekanisme sirkulasi elit politik dalam mengisi jabatan – jabatan politik di pemerintahan. Dalam hal tersebut, elit – elit politik ini haruslah memiliki keunggulan – keunggulan.

¹³ *Ibid*

Dalam kontestasi pilkada jika kita melihat prosentase kandidat yang diusung oleh partai politik baik dari hasil kursi atau jumlah suara yang diperoleh dalam pemilu legislatif masing – masing pasangan calon mendapat prosentase dukungan yang berbeda.

Ada pasangan calon yang mendapatkan dukungan suara partai politik yang sangat besar atau lebih dominan, tetapi juga ada yang mendapatkan dukungan sedikit partai atau partai minoritas. Namun mendapatkan dukungan yang lebih dominan dari partai politik saja belum bisa menjamin pasangan calon tersebut akan memenangkan pilkada secara langsung, karena itu dalam pilkada biasanya pengaruh figur dari calon yang berkompetisi lebih besar dan kompetisi antar partai atau koalisi partai politik tidak terlalu menonjol. Dalam kontestasi pilkada pada umumnya peran figur masing – masing calon dipandang sangat menentukan kemenangan karena pada dasarnya pilkada merupakan arena kontestasi bagi individu masing – masing calon bukan partai politik.

Dukungan dari partai politik memang penting dalam pencalonan diri seseorang dalam kontestasi pilkada, tetapi calon juga harus berusaha untuk mendapatkan sebanyak mungkin dukungan dari kekuatan – kekuatan non-politik lainnya seperti organisasi keagamaan, pemuda, profesi, dan lainnya.¹⁴ Dalam konteks politik lokal, banyak elit – elit yang menduduki jabatan politik dan jabatan – jabatan strategis yang mempunyai peran penting dan pengaruh terhadap kelompok masyarakat di daerah tersebut. Dimana elit non-politik ini biasanya elit dari berbagai organisasi masyarakat yang dominan di daerah tersebut dan memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Selain dukungan partai, para calon harus berusaha untuk mengumpulkan sebanyak mungkin dukungan dari elit – elit non-politik ini dan memperkuat keunggulan dirinya sebagai figur calon Kepala Daerah di mata masyarakat, karena kembali lagi bahwa sebenarnya pertarungan dalam pilkada selalu antar individu daripada partai.

¹⁴ Haryanto, *Kekuasaan elit (suatu bahasan pengantar)*, JIP (Yogyakarta : UGM, 2005), hlm. 72

Modal politik dapat diartikan sebagai dukungan politik melalui partai politik atau koalisi partai politik dan juga dukungan dari para elit non-partai yang berpengaruh di masyarakat untuk tujuan memenangkan pilkada. Dalam modal politik dukungan berupa kepemilikan jabatan – jabatan politis serta dukungan partai politik (koalisi partai) dan juga adanya tim sukses yang solid sangat berperan penting dalam kemenangan pilkada.

b. Modal Sosial

Dalam melihat modal sosial yang dimiliki oleh seorang calon kita bisa mencermatinya melalui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh calon tersebut, pekerjaan awal, ketokohnya dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi masyarakat, kepemudaan, dan lain sebagainya). Hal – hal yang tersebut diatas merupakan modal sosial yang setidaknya harus dimiliki oleh seseorang jika ingin berkompetisi dalam pilkada. Modal sosial tersebut diperoleh dengan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat bahwa kekuasaan juga diperoleh karena kepercayaan.¹⁵

Dalam hal ini kepercayaan yang diperoleh oleh calon di gunakan untuk memperoleh kedudukan atau jabatan publik yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang atau sekelompok orang yang memang dapat dipercaya atas dasar kepercayaan masyarakat. Jika kepercayaan ini dilanggar, maka masyarakat akan dengan mudah untuk kehilangan kepercayaannya kepada pemegang kekuasaan dan tidak akan mudah untuk percaya lagi. Sedangkan untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat seorang calon membutuhkan pengaruh popularitas, ketokohan, latar belakang keluarga dan pendidikan sebagai faktor penentu kemenangan dalam sebuah pilkada.

Dalam melihat modal sosial, para pakar mendefinisikannya dalam dua kelompok. Kelompok pertama menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*), sedangkan kelompok kedua lebih menekankan pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang

¹⁵ *ibid*

terlibat dalam interaksi sosial.¹⁶ Sejumlah ahli menyampaikan pandangannya mengenai modal sosial yang diolah Mefi Hermawati sebagai berikut :¹⁷

- a. Robert Putnam dalam bukunya yang berjudul *Making Democracy Work : Civic Tradition in Modern Italy* menjelaskan bahwa modal sosial merupakan suatu *mutual trust* antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma – norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong untuk terciptanya sebuah kolaborasi sosial berupa koordinasi dan kooperasi untuk kepentingan bersama. Dalam pandangan yang disampaikan oleh Putnam ini dapat disimpulkan bahwa diperlukan jaringan atau ikatan sosial yang ada dalam masyarakat, dan norma yang mendorong produktivitas.
- b. Piette Bourdieu (1970) mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik. Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk – bentuk *social capital* berupa institusi lokal atau kekayaan sumber daya alam. Dalam pendapatnya ini, Bourdieu menegaskan tentang modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam etnis sosial tertentu maupun dalam paguyuban, kelompok atau asosiasi tertentu lainnya.
- c. James Coleman (1999) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu yang memiliki dua ciri, yaitu merupakan aspek dari struktur sosial serta memfasilitasi tindakan individu dalam struktur sosial tersebut. dalam pengertian ini, bentuk – bentuk modal sosial berupa kewajiban dan

¹⁶ Jamaludin Ancok, “*Modal Sosial, dan Kualitas Masyarakat*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar UGM Yogyakarta, tanggal 3 Mei 2003

¹⁷ Mefi Hermawati, “*Penguatan dan Pembangunan Modal Sosial Masyarakat Adat*”, Laporan Need Assesment Pemberdayaan Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur, IRE Yogyakarta, 2002

harapan, potensi informasi, norma dan sanksi yang efektif, hubungan otoritas, serta organisasi sosial yang bisa digunakan secara tepat dan melahirkan kontrak sosial.

- d. North (1990) dan Olson (1982) melihat modal sosial melalui pandangan lain. Mereka menekankan lingkungan sosial politik sebagai modal sosial. Faktor lingkungan sosial berpengaruh pada peluang bagi norma untuk mengembangkan dan membentuk struktur sosial. Jika pada pandangan Putnam dan Coleman hanya menekankan pada asosiasi horizontal dan vertikal, North dan Olson menambahkan peran struktur dan hubungan institusional yang lebih formal, seperti pemerintah, rezim politik, hukum, sistem peradilan, serta kebebasan sipil dan politik

Franacis Fukuyama menjadikan bahasan tentang *trust* menjadi elemen penting dalam kajiannya yang terkait dengan modal sosial dan kebijakan sosial. Fukuyama mendefinisikan modal sosial (*social capital*) sebagai serangkaian nilai atau norma – norma informal yang dimiliki bersama diantara anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka.

Fukuyama mengeksplorasi modal sosial lebih dalam guna mendeskripsikan bahwa masyarakat dengan kepercayaan tinggi, dijamin sukses menjalankan visi dan misinya (*high-trust society*). Sebaliknya, sikap saling curiga dan suka menaruh kecewa kepada unit masyarakat lainnya adalah indikasi rendahnya kepercayaan (*low-trust society*) di masyarakat atau yang sering diistilahkan dengan *zero trust society*. Jika dianalogikan maka akan seperti ketika seorang calon anggota legislatif yang terpilih tidak berdasarkan modal sosial berupa kepercayaan tinggi dari masyarakat, akan kesulitan dalam menjalankan misi politiknya sehari – hari.

Modal sosial bagi Fukuyama adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau dibagian – bagian tertentu darinya. Ia bisa dilembagakan dalam suatu kelompok sosial yang paling kecil dan mendasar. Modal sosial dalam pandangan Fukuyama

berbeda dengan modal manusia (*human capital*) sejauh ia bisa diciptakan dan ditransmisikan melalui mekanisme kultural seperti agama, tradisi atau sejarah.¹⁸

Piere Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki oleh seseorang yang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan pengenalan timbal balik atau dengan kata lain menjadi bagian dalam suatu keanggotaan dalam suatu kelompok sosial tertentu dalam masyarakat yang memberikan berbagai bentuk dukungan kolektif bagi anggotanya. Pendapatnya tentang modal sosial ini mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang diperoleh oleh seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam suatu entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi, dsb).

Instrumen utama yang digunakan oleh Bourdieu dalam memahami suatu individu adalah terletak pada konsep *habitus* dan *field*, atau habitat dan ranah serta bagaimana strategi untuk mencapai dan mempertahankan sebuah kekuasaan. *Habitus* secara memadai mengandaikan suatu bentuk epistemologi sejarah dalam arti mengungkap relevansi praktis dari sebuah wacana. Konsep ini berasal dari tradisi filsafat yang kemudian digunakan Bourdieu untuk memahami individu. *Habitus* sendiri dalam bahasa latin dapat diartikan sebagai kebiasaan (*habitual*), penampilan diri atau bisa pula merujuk pada tata pembawaan yang terkait dengan kondisi tubuh.¹⁹

Dalam pemikirannya, Bourdieu mengkondisikan *habitus* sebagai pengkondisian yang dikaitkan dengan syarat – syarat keberadaan suatu kelas. *Habitus* sendiri dapat menghasilkan disposisi sistem – sistem yang tahan waktu dan dapat diwariskan. Dengan demikian maka *habitus* adalah hasil dari

¹⁸ Fukuyama, Francis, (terj. Ruslani), “*Trust, Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*”, Penerbit Qalam : Yogyakarta, 2002

¹⁹ Adib, Mohammad, “*Agen dan Struktur dalam Pandangan Piere Bourdieu*”, Jurnal, Universitas Airlangga, 2012

keterampilan yang menjadi tindakan praktis yang tidak selalu disadari yang kemudian diterjemahkan menjadi suatu kemampuan yang kelihatannya alamiah dan berkembang dalam lingkungan sosial tertentu.

Ignas Kleden menarik tujuh elemen penting *habitus*, yaitu :

- Produk sejarah, sebagai perangkat disposisi yang bertahan lama dan diperoleh melalui latihan berulang kali
- Lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang sudah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial dimana dia diproduksi (struktur yang distrukturkan)
- Disposisi yang terstruktur sekaligus berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang karena itu menjadi *structuring structures*
- Meskipun *habitus* lahir dalam kondisi sosial tertentu dia bisa dialihkan ke kondisi sosial yang lain, maka *habitus* juga bersifat *transposable*
- *Habitus* bersifat pra sadar karena tidak merupakan hasil dari refleksi diri atau pertimbangan rasional, *habitus* lebih merupakan spontanitas yang tidak disadari dan tidak dikehendaki dengan sengaja tetapi juga bukan suatu gerakan mekanistik yang tanpa latar belakang sejarah sama sekali
- Bersifat teratur dan berpola, *habitus* bukan hanya *state of mind* tapi juga *state of body* dan bahkan menjadi *the site of incorporated history*
- *Habitus* dapat terarah pada tujuan dan hasil tindakan tertentu

Kemudian Bourdieu juga menjelaskan tentang *field* atau ranah yang dipandang secara relasional daripada secara struktural oleh Bourdieu, dimana *field* diartikan oleh Bourdieu sebagai jaringan relasi antarposisi objektif didalam struktur sosial. Keberadaan relasi – relasi ini terpisah dari kesadaran dan kehendak individual. *Field* merupakan arena kekuatan sebagai uoaya perjuangan untuk memperebutkan sumber daya atau modal dan juga memperoleh akses tertentu yang dekat dengan hirarki kekuasaan. *Field* merupakan semacam hubungan yang terstruktur dan tanpa disadari mengatur

posisi – posisi individu dan kelompok dalam tatanan masyarakat sosial yang terbentuk secara spontan. Bourdieu menyatakan ada tiga langkah proses untuk menganalisis *field*, yaitu :

- Menggambarkan keutamaan ranah (lingkungan) kekuasaan (politik) untuk menemukan hubungan setiap lingkungan khusus dan lingkungan politik
- Menggambarkan struktur objektif hubungan antar berbagai posisi di dalam *field* tersebut
- Analisis harus mencoba menentukan ciri – ciri kebiasaan agen yang menempati berbagai tipe posisi dalam *field*, posisi agen ditentukan jumlah dan bobot relatif dari modal yang mereka miliki

Maka dari sinilah peneliti dapat melihat hubungan *relasional* yakni struktur objektif dan representasi subjektif, agen dan pelaku, terjalin secara dialektik, saling mempengaruhi, tidak saling menafikan, tapi saling bertaut dalam sebuah *social practice*. Dimana hubungan ketiganya dapat kita tarik menjadi suatu bentuk rumusan sebagai berikut ((**Habitus + Field**) = **Praktik**). Jika individu memiliki *habitus* yang sudah melekat baik dalam dirinya, maupun secara kolektif dan modal yang memadai ditambah *field* yang memungkinkan untuk mereka menjalin relasi atau mendapatkan dukungan maka terjadilah praktik sosial. Dalam konteks kontestasi pilkada ini praktik sosial yang dimaksudkan oleh penulis adalah memenangkan kontestasi.

Modal merupakan sebuah konsentrasi kekuatan spesifik yang beroperasi dalam *field* dan setiap *field* menuntut individu untuk memiliki modal khusus agar dapat bertahan hidup secara proposional dan bertahan didalamnya.²⁰ Dalam *field* pertarungan sosial akan selalu terjadi mereka yang memiliki modal dan *habitus* yang sama dengan kebanyakan individu

²⁰ Adib, Mohammad, “Agen dan Struktur dalam Pandangan Pierre Bourdieu”, Jurnal, Universitas Airlangga, 2012

akan lebih mampu melakukan tindakan mempertahankan atau mengubah struktur daripada mereka yang tidak memiliki modal. Bourdieu dalam hal ini memandang modal sosial dari perspektif aktor yang menurutnya modal sosial berisi sumber daya dimana pelaku individu dapat menggunakannya karena kepemilikannya terhadap jaringan secara eksekutif. Bourdieu juga mengatakan bahwa dalam melihat individu adalah melalui *habitus* dan *field*, karena penting untuk melihat individu secara strukturalis.

Dapat disimpulkan bahwa modal sosial yaitu dukungan figur calon karena ketokohan yang dimiliki sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat yang menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan- jaringan yang dibangun untuk mendukung calon.

c. Modal Ekonomi

Dalam setiap kontestasi pilkada tentunya setiap calon yang akan berkontestasi harus mempersiapkan banyak hal. Dalam mempersiapkan dan menghadapi kontestasi politik yang akan berlangsung perlu modalitas ekonomi atau dana politik yang tidak sedikit, karena hal tersebut berkaitan dengan pembiayaan yang besar yang digunakan untuk membiaya semua operasional politik yang berlangsung selama kontestasi berlangsung.

Pengertian modal ekonomi berangkat dari pemahaman terhadap benda yang memiliki nilai ekonomis yang disimbolkan dengan uang. Dalam perspektif ekonomi, modal bisa pula berupa investasi yang diberikan oleh seseorang pada pihak lain, kemudian dipertukarkan dengan keuntungan berupa barang atau uang/jasa politik. Modal ekonomi memiliki makna penting sebagai penggerak dan pelumas bagi mesin politik yang digunakan dalam kontestasi politik apapun. Misalnya dalam musim kampanye dimana setiap partai akan membutuhkan uang yang banyak untuk membiayai berbagai kebutuhan dan operasional kampanye seperti mencetak baner, spanduk, poster, membuat iklan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Dalam keadaan lainnya, modal ekonomi juga bisa menjadi penentu bagi seorang calon untuk

dapat mengikuti kontestasi pilkada apabila calon tersebut bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Modal ekonomi atau finansial (*financial capital*) didefinisikan oleh para ekonom sebagai sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli fasilitas dan alat – alat produksi perusahaan seperti mesin, pabrik, alat kantor, dan lain sebagainya atau sejumlah uang yang dapat dikumpul atau ditabung untuk investasi di masa depan. Konsep modal yang seperti ini relatif mudah dipahami untuk orang awam, karena pada dasarnya membelanjakan atau menginventasikan uang merupakan bagian dari kehidupan sehari – hari masyarakat. Selain itu modal finansial juga sangat mudah diukur, dimana uang yang dijadikan sebagai alat tukar utamanya dapat dihitung. Karena jumlah uang yang dibelanjakan dapat diidentifikasi dengan barang yang dibeli.²¹

Modal politik dan ekonomis saling berkaitan erat dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan yang memiliki jarak waktu interaksi atau komunikasi yang pendek diantara pemilih dengan calon politik. Dengan waktu yang singkat dalam melakukan sosialisasi diri selaku calon kepala daerah kepada calon pemilih mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalan pintas bagi para calon tersebut. Kondisi tersebut bukanlah rahasia lagi di masyarakat, terutama di negara – negara berkembang praktik ini seringkali terjadi dalam setiap kontestasi politik. Negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional menjadi tempat yang rawan untuk terjadinya kondisi tersebut.

Dalam pemilihan umum biasanya pilihan publik dilihat dari perspektif politik dan ekonomi merupakan suatu proses dimana preferensi individu masyarakat dikombinasikan ke dalam keputusan kolektif. Konsep pilihan publik dalam pemilihan umum merupakan transformasi dari ekonomi klasik, secara sederhana akan digambarkan pada tabel berikut mengenai perbedaan perspektif ekonomi dan politik :

²¹ Edi, Suharto. Phd, *Modal Sosial dan Kebijakan Sosial*, (Yogyakarta : UGM, 2000)

Tabel 1. 1 Perspektif Ekonomi Politik Pilihan Publik, Didik J, Rachbini, 2001

Variabel	Perspektif Ekonomi	Perspektif Politik
Supplier	Produsen, Pengusaha, Distributor	Politisi, Parpol, Birokrasi, Pemerintah
Demande	Konsumen	Pemilih (<i>voters</i>)
Jenis Barang	Barang Individu (<i>private goods</i>)	Barang Publik (<i>public goods</i>)
Alat Transaksi	Uang	Suara
Jenis Transaksi	Sukarela (<i>voluntary transaction</i>)	Suara <i>Political exchange</i>

Setiap calon akan sangat membutuhkan dukungan ekonomi dalam menjalani proses kontestasi pemilihan kepala daerah. Dukungan ekonomi tersebut selain dari masing – masing calon juga bisa berasal dari aktor – aktor ekonomi lain yang kemudian digunakan untuk kemenangan pilkada guna membiayai seluruh kegiatan politik dari calon tertentu. Menurut Sahdan dan Haboddin mengatakan bahwa proses politik dalam pilkada membutuhkan biaya atau ongkos yang sangat mahal. Hal tersebut kemudian menyebabkan tantangan dalam proses perkembangan demokrasi lokal, karena tuntutan tersebut maka hal yang sering terjadi adalah calon – calon yang bertarung merupakan para pemilik modal yang besar. Sehingga hal tersebut sedikit menghambat bagi calon yang tidak memiliki modal yang besar dan dapat dikatakan juga sebagai tantangan bagi perkembangan demokrasi lokal. mahalnya biaya pilkada bisa disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu :²²

²² Sahdan dkk, Evaluasi Kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia (Yogyakarta : IPD, 2009), hal 120 - 121

1. Pasangan calon kepala daerah yang akan nbertarung diharuskan membeli partai politik sebagai kendaraan politiknya. Partai politik yang akan dijadikan kendaraan dalam pilkada mengharuskan pasangan calon untuk menyeter sejumlah dana sumbangan hingga miliaran rupiah
- 2 Model kampanye politik yang dilakukan oleh pasangan calon membutuhkan banyak biaya. Misalkan membuat poster cetak, pemasangan iklan di media massa baik cetak maupun eletronik
- 3 Untuk membujuk para pemilih biasanya para calon akan menggunakan praktik politik uang. Model pemberian uang kepada pemilih biasanya dilakukan hampir dalam setiap prses pentahapan pilkada. Peredaran uang yang paling menonjl adalah saat – saat kampanye dan menjelang pemungutan suara.

Dana politik dapat bersumber dari dana pribadi calon atau dari sumbangan dari simpatisan baik secara pribadi ataupun perusahaan atau lembaga. Sedangkan untuk penggunaannya dana politik dapat digunakan untuk membayar partai, kampanye, membuat peraga kampanye, hingga membeli suara. Sehingga tidak heran jika pengeluaran biaya sangat besar dimungkinkan dalam sistem pilkada, karena arena kompetisi pilkada sangat terbuka dan kompetitif. Dengan sistem demokrasi yang kita gunakan menempatkan masyarakat sebagai pemilih dan penentu apakah pasangan calon yang maju dalam pilkada dipilih atau tidaknya semakin meningkatkan kompetisi diantara pasangan calon untuk menggunakan berbagai cara mendapatkan hati pemilih. Sehingga besarnya *cost politic* dalam setiap gelaran pilkada tidak bisa dihindari, karena pelaksanaan pilkada sejak persiapan hingga kampanye, mobilisasi dan sosialisasi semuanya memerlukan dana politik. Besarnya modalitas yang dimiliki oleh seorang calon terkadang menjadi alasan partai politik untuk mengusungnya dan mengambil keuntungan dari kekuatan modalitas yang dimiliki calon.

1.6.2 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan daerah yang seterusnya akan disebut pilkada merupakan suatu bentuk dari realisasi demokrasi lokal. Pemilu sebagai representasi dari sistem demokrasi, dimana dalam demokrasi mengklaim bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Maka dari itu pilkada di lakukan sebagai wujud realisasi dari konsep demokrasi yang ada, dimana rakyat sebagai pemegang suara tertinggi memiliki kuasa dalam menentukan siapa pemimpin yang akan memimpin mereka untuk jangka waktu tertentu. Berawal dengan masuknya demokrasi di Indonesia, maka kekuasaan yang *absolute* bertransformasi menjadi kekuasaan konstitusional. Dalam demokrasi, keyakinan bahwa legitimasi politik berkaitan dan menempel pada kelompok eksklusif atau kasta karena bakat, status, dan latar belakang. Robbert Eccleshall mengungkapkan bahwa publik mejadi penentu jalannya pemerintahan dan pemegang kekuasaan tertinggi.²³

Kekuasaan rakyat kemudian direpresentasikan dalam pemilu yang melibatkan publik dalam pengambilan keputusan untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dalam demokrasi partisipasi dan kebebasan tersebut kemudian di terapkan dalam sebuah pemilu, dimana pemilu dijadikan sebagai platform pengkonfersian suara masyarakat menjadi kursi jabatan yang akan diduduki oleh calon – calon yang ada. Outut yang dihasilkan dari pilkada langsung adalah hadirnya kepala daerah yang bisa memenuhi preferensi mayoritas masyarakat lokal dan terbentuknya pemerintahan daerah yang baik dan harmonis. Pilkada diharapkan bisa menjadi suatu proses seleksi bagi para pemimpin yang mendapatkan penilaian langsung dari rakyatnya sebagai bentuk perubahan dalam sistem pemerintahan, dimana pemimpin yang mereka anggap baik yang memenangkan kontestasi pilkada mampu melakukan perubahan atau perombakan dan gebrakan menuju pemerintahan yang baik.

Pilkada dapat dilihat sebagai satu pencapaian baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan penerapan pilkada setidaknya secara prosedural, kedaulatan politik benar – benar berada di tangan rakyat. Dengan perubahan pada

²³ Robbert Eccleshall, *Political Ideologies : An Introduction*, (London : Routledge, 1994)

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 pilkada yang dulunya kepala daerah di pilih oleh DPRD sekarang menjadi pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat membuat legitimasi menjadi semakin kuat dan membuat prosesnya lebih transparan di mata masyarakat. Perubahan pilkada menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat juga merupakan upaya yang dilakukan untuk memutus oligarki partai yang mendominasi pola pengorganisasian partai politik di dalam tubuh DPRD dan juga memiliki dampak memutus distorsi dan politisasi aspirasi publik.²⁴ Pemilihan kepaladaerah merupakan kesempatan bagi siapapun untuk ikut berkompetisisecara *fair* dan terbuka. Partai politik bukanlah satu – satunya jalan bagi seseorang jika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah karena terdapat jalur lainnya yaitu jalur *independen*. Jika ingin mencalonkan pasangan partai politik harus memenuhi persyaratan jumlah minimal kursi yang diperoleh di DPRD, jika jursi yang diperoleh oleh suatu partai dibawah ambang batas yang ditentukan maka partai politik akan melakukan koalisi dengan partai politik lainnya untuk memenuhi persyaratan pengusungan calon.

1.6.3 Kontestasi Politik

Kontestasi politik tidak memiliki definisi atau pengertian secara harfiah dan baku. Di Indonesia makna kata kontestasi sudah berkembang sejak lama, terutama pada saat terjadi pemilihan-pemilihan atau persaingan dalam memperebutkan sesuatu hal, salah satunya dalam memperebutkan kekuasaan, maupun kursi jabatan. Jika melihat pengertian kontestasi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maka kontestasi di sama artikan dengan kontroversi atau debat, yang mana merupakan sistem untuk memperebutkan dukungan rakyat.²⁵ Bukan hanya itu, jika melihat apa yang berkembang di masyarakat maka kontestasi diartikan sebagai perlombaan atau pemilihan.²⁶ Sehingga dari penjelasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa kontestasi diartikan sebagai sebuah perlombaan atau pemilihan demi memperebutkan dukungan rakyat. Kemudian jika dikombinasikan dengan politik

²⁵ KBBi

²⁶ Gustaaf Kusno, “Istilah ‘Kontestasi’ yang Ngawur”, (Kompasiana.com, 2013)

bisa dikatakan mengandung arti yang hampir sama, dimana kontestasi politik adalah perlombaan di dalam suatu pemilihan demi memperebutkan dukungan rakyat agar bisa menempati kekuasaan.

Di dalam politik, kontestasi dianggap sebagai salah satu hal penting yang tidak boleh begitu saja dipandang sebelah mata. Kontestasi politik selalu dikaitkan dengan pemilihan-pemilihan yang memperebutkan kekuasaan atau jabatan, seperti pemilihan umum untuk pemilihan presiden, kepala daerah, maupun pemilihan legislatif. Di dalam pemilihan seperti itu pasti ada pihak yang berbeda dan bersaing atau berlomba, sehingga mereka saling menonjolkan apa kelebihan mereka. Dalam ruang lingkup kontestasi politik di pemilihan seperti itu maka pihak-pihak yang berlomba saling bersaing terhadap nilai, fakta, serta kebijakan.²⁷ Tiap pihak atau calon yang berlomba harus berupaya dan merancang strategi untuk bisa mendapatkan dukungan rakyat dan memenangkan pemilihan tersebut. Dengan adanya perlombaan hingga persaingan yang sengit seperti itu akhirnya menimbulkan reaksi yang berbeda-beda dari setiap masyarakat. Namun jika tidak ada kontestasi politik sendiri di dalam pemilihan maka bisa di katakan bahwa pemilihan tersebut hambar tanpa adanya pelengkap wajibnya.

Kontestasi politik sendiri juga merupakan ajang dari para calon untuk bisa mempengaruhi masyarakat agar memilih mereka. Banyak cara yang dilakukan oleh para calon dalam kontestasi politik di pemilihan, mulai dari cara-cara baik hingga buruk atau cara yang bersifat positif maupun negatif. Akhirnya tidak menutup kemungkinan bahwa kontestasi politik juga berdampak buruk dalam masyarakat. Banyak hoaks dan diskriminasi SARA merupakan contoh cara negatif dalam berkontestasi politik yang akhirnya membawa suasana pemilihan menjadi tidak kondusif. Indonesia sebagai negara demokrasi pun juga masih banyak melahirkan dampak dari adanya kontestasi politik di dalam pemilihan. Dampak paling buruk

²⁷ Basuki Agus Suparno, "Kontestasi Makna dan Dramatisme Komunikasi Politik tentang Reformasi di Indonesia", (Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta, Vol. 8, No. 1, 2010)

yang saat ini heboh terjadi adalah mudahnya masyarakat Indonesia yang mengikuti arus arah yang salah dan mudah terpecah belah.

Kontestasi politik diibaratkan sebagai sebuah mobil yang ingin mengikuti balap mobil, pemilik mobil harus melihat tiga hal yaitu keadaan mobil yang baik, sopir yang menguasai atau piawai, dan bahan bakar yang mencukupi. Secara konseptual maka kontestasi politik juga sama dengan pengisyratan diatas, dimana setiap calon atau pihak yang ingin berlomba dalam pemilihan maka mereka harus menyiapkan tiga hal pokok, yaitu modal politik (political capital), modal sosial (social capital), dan modal ekonomi (economical capital). Disaat ketiga hal tersebut dimiliki setiap calon dan semakin besar akumulasi ketiga hal itu dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan calon akan memperoleh dukungan dari masyarakat.²⁸

Kontestasi politik paling sering memang dikaitkan dengan pemilihan, utama pada pemilihan kepala daerah (pemilukada) di negeri ini. Dalam pemilukada, kontestasi politik dijadikan arena untuk berkompetisi di antara para calon yang dipengaruhi oleh kapasitas figur dari setiap calon tersebut. Kapasitas figur sendiri bisa dipandang dari ketokohan, popularitas, moralitas, latar belakang pendidikan, serta latar belakang pekerjaan dari setiap calon. Karena pada era saat ini, kontestasi politik bisa saja menjadi arena persaingan yang setiap calonnya hanya mengandalkan popularitas dan figur semata.²⁹ Tetapi selain kapasitas figur, kontestasi politik juga dipengaruhi oleh beberapa hal penting lainnya, seperti dukungan dari partai politik maupun aktor-aktor sosial, ekonomi, maupun agama.

²⁸ Kacung Marijan, *Demokratisasi di Daerah, Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006)

²⁹ Stella Maria I. P., "Modalitas dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny SONDakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilukada di Kota Bitung Sulawesi Utara tahun 2010)", (Tesis Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang, 2012)

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Fokus Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yang lokasinya telah ditentukan dengan sengaja serta disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dimana lokasi penelitian ini terletak di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pada penelitian ini akan berfokus pada bagaimana proses pemenangan Mundjidah Wahab hingga bisa terpilih menjadi Bupati Jombang periode 2018 – 2023 serta apa saja yang mendukung kemenangan Mundjidah Wahab. Lebih lanjut penelitian ini akan berfokus pada bagaimana pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah memanfaatkan semua sumber daya yang mereka miliki untuk dapat memenangkan Pilkada Jombang 2018.

1.7.2 Tipe Penelitian

Dalam proses mengamati dan mengumpulkan data dan menyajikannya dalam bentuk analisis sangat diperlukan sebuah pendekatan penelitian yang tepat. Penentuan pendekatan yang akan digunakan dalam sebuah penelitian akan sangat berpengaruh dan berkaitan langsung dengan hasil penelitian. Pendekatan yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor – faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut dan juga mengungkapkan proses kejadian secara mendetail.³⁰

Penelitian deskriptif kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif dimana dalam penelitian ini berupaya untuk menggambarkan atau menyajikan dan memberikan pemahaman secara mendalam pada suatu kasus dengan menggunakan analisa serta memberikan gambaran subjek ataupun objek secara lengkap, detail, dan apa adanya sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, untuk dapat memberikan informasi yang sesuai demi menjawab permasalahan penelitian.

³⁰ Cici Safitri, “Pengaruh Modal Sosial dalam Kemenangan Mahyeldi Ansyarullah-Hendri Septa Pada Pilkada 2018”, (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, 2019)

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta dan untuk memahami secara mendalam suatu kasus atau permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif hanya menampilkan data yang nantinya akan digunakan untuk mengungkap data tersebut sebagai sebuah fakta.

Pada penelitian ini terdiri dari pengumpulan data, menganalisis data, menginterpretasi data, dan juga pemberian kesimpulan pada data tersebut. Penelitian dengan tipe deskriptif juga dipilih supaya dapat menjelaskan secara menyeluruh bagaimana modalitas yang dimiliki oleh Mundjidah Wahab dan Sumrambah dapat mendukung kemenangannya dan bagaimana pemanfaatan modalitas tersebut dalam pilkada Jombang Tahun 2018. Dan dengan tipe penelitian ini akan diperoleh deskripsi tentang bagaimana Mundjidah Wahab dapat memenangkan pilkada Jombang Tahun 2018 dan bagaimana strategi kemenangan yang digunakan untuk meraih kemenangannya. Penelitian deskriptif ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel atau kondisi yang terjadi.

Pendekatan dengan tipe deskriptif ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk dapat menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan atau fenomena yang dibahas oleh peneliti secara tertulis kedalam suatu laporan penelitian yang kompleks dan efisien. Yang kemudian menjadikan tujuan yang diinginkan oleh penulis dapat terjawab dengan baik. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif peneliti menganggap akan lebih dapat menjelaskan permasalahan penelitian secara komprehensif sesuai dengan kondisi masalah secara apa adanya.

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data penelitian yang terdiri dari mereka - mereka yang dianggap sebagai informan dari pihak yang dijadikan sampel dalam penelitian. Pengertian informan adalah orang – orang yang memberikan informasi atau data mengenai dirinya ataupun orang lain atau suatu kejadian kepada peneliti³¹, dan subjek penelitian ini selanjutnya akan di sebut sebagai informan. Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan

³¹ Afrizal, “Metode Penelitian Kualitatif”, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015)

menggunakan beberapa informan yang terpercaya dan dipilih. Pemilihan informan merupakan hal terpenting dalam penelitian kualitatif, dimana informan yang dipilih harus sesuai sasaran agar peneliti mendapatkan informasi dengan benar, selain itu pemilihan informan yang tepat juga akan berimplikasi pada validasi informasi yang akan disampaikan. Dalam penelitian kualitatif ini tidak sembarangan dalam memilih dan menentukan informan sebagai sumber informasi dan data yang akan menunjang dalam menjawab permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Dalam subjek penelitian juga dibahas karakteristik informan yang akan diterapkan dalam penelitian. Ada dua kategori informan, yaitu informan pengamat dan informan pelaku.³² Informan pengamat adalah informan yang memberikan informasi tentang orang lain atau suatu kejadian atau suatu hal kepada peneliti. Informan dalam kategori ini dapat orang yang tidak diteliti oleh peneliti dengan kata lain orang lain yang mengetahui orang yang akan diteliti.³³ Mereka dapat juga disebut sebagai saksi suatu kejadian atau pengamat lokal. Sedangkan informan pelaku adalah informan yang memberikan keterangan tentang dirinya, tentang perbuatannya, tentang pikirannya, tentang intepretasinya atau tentang pengetahuannya. Mereka ini adalah subjek dari suatu penelitian itu sendiri.³⁴

Pemilihan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yang artinya sebelum penelitian dilakukan peneliti telah menetapkan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sebagai sumber informasi. Kriteria yang ditetapkan bersifat relatif, tergantung pada kebutuhan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Dan subjek – subjek penelitian yang akan berperan sebagai narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Hj. Mundjidah Wahab selaku Bupati Kabupaten Jombang masa jabatan 2018 – 2022 dan ketua DPC PPP sebagai informan utama dalam penelitian ini

³² ibid

³³ Ibid

³⁴ ibid

- b. Sumrambah selaku Wakil Bupati Kabupaten Jombang masa jabatan 2018 – 2022 sebagai informan pendukung dalam penelitian ini
- c. Perwakilan Muslimat sebagai basis jaringan dukungan utama Hj. Mundjidah Wahab dalam Pilkada Jombang 2018
- d. Perwakilan Muslimat oposan Hj. Mundjidah Wahab Bu Kholilah Ketua PAC Muslimat Bandar Kedungmulyo, anggota DPRD Jombang dari partai PKB
- e. Perwakilan Tim Pemenangan pasangan Hj. Mundjidah Wahab – Sumrambah dalam Pilkada Jombang 2018 (informan pengamat) M. Syarif Hidayatulloh Ketua DPC Demokrat Jombang, anggota DPRD Jombang
- f. Ibu Lilis 59 Tahun anggota Muslimat dan warga Tambakberas Jombang
- g. Umar 21 Tahun warga Tambakberas
- h. Suroso, 63 Tahun, kader PDIP
- i. Rendi 19 Tahun warga Tambakberas dan santri Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas
- j. Saiful 45 Tahun warga Tambakberas

1.7.4 Lokasi Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian untuk skripsi ini di Kabupaten Jombang dimana peneliti akan melakukan interaksi atau wawancara dengan beberapa informan dan narasumber yang telah ditentukan. Kabupaten Jombang menjadi perhatian peneliti dikarenakan banyak hal menarik yang menarik untuk dibahas. Salah satunya karena pada pilkada Jombang 2018 kedua petahana kembali mencalonkan diri tetapi terjadi “*pecah kongsi*” antara petahana Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian bagaimana seorang perempuan yaitu Mundjidah Wahab yang mencalonkan diri sebagai Bupati dapat memenangkan kontestasi dan berhasil meraih *title* Bupati perempuan pertama di Kabupaten Jombang yang terkenal dengan julukan Kota Santri. Selain itu juga koalisi partai yang didominasi oleh pasangan Nyono Suharli (petahana Bupati) dan Subaidi Muchtar tetap tidak dapat mengalahkan pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah yang hanya didukung

oleh 3 partai. Kemudian ditengah proses kontestasi terjadi OTT KPK kepada Nyono Suharli dengan sekejap langsung merubah peta kekuatan politik di Kabupaten Jombang.

Penuh dengan dinamika yang cukup menarik untuk dibahas maka peneliti tertarik untuk menjadikan Kabupaten Jombang sebagai *locus* penelitian. Dalam pilkada serentak 2018 lalu Kabupaten Jombang merupakan satu dari 171 daerah yang juga melaksanakan pilkada serentak. Melihat keadaan masyarakat yang plural meskipun Jombang dijuluki sebagai Kota Santri tetapi masyarakat Jombang tidak hanya terdiri dari kaum agamis saja melainkan banyak juga yang nasionalis atau *abangan*, dimana hal tersebut membuat Jombang semakin dinamis.

Sepanjang sejarah Jombang telah melakukan 4 kali pemilihan umum kepala daerah dimulai tahun 2003, 2008, 2013, dan 2018. Dari ketiga waktu pemilihan tersebut memiliki berbagai macam sejarah dan dinamika yang berbeda – beda tiap masanya, baik dalam jumlah calon yang maju dalam kontestasi pilkada dan masalah yang mengiringinya. Pada pilkada tahun 2003 dan 2008 PDIP mendominasi dengan kepemimpinan Suyanto sebagai bupati 2 periode berhasil mengukuhkan posisi PDIP dalam kancah perpolitikan di Kabupaten Jombang. Pada pilkada tahun 2013 PDIP tidak berhasil melanjutkan suksesi kekuasaannya dalam eksekutif dan digantikan oleh Golkar melalui kemenangan Nyono Suharli.

Identitas Jombang sebagai Kota Santri tiak begitu terepresentasikan melalui pilkada. Partai Islam berbasis NU seperti PKB dan PPP tidak pernah berhasil memenangkan kontestasi pilkada di Kabupaten Jombang. Meskipun Jombang merupakan tempat kelahiran NU dan Kyai – Kyai besar NU berasal dari Jombang tetapi belum pernah sekalipun partai berbasis NU seperti PKB dan PPP memenangkan kursi Bupati. Kemajuan baru terjadi di tahun 2013 ketika Nyono Suharli maju dalam kontestasi Bupati dengan menggandeng Mundjidah Wahab yang berasal dari PPP dan berhasil memenangkan kontestasi pilkada.

Pada kontestasi pilkada tahun 2018 lalu terjadi perubahan peta kekuatan yang menarik di perpolitikan kabupaten Jombang. Pertama kali dalam sejarah pemilihan kepala daerah di Jombang seorang perempuan dapat memenangkan kursi Bupati di Kabupaten Jombang. Hal tersebut tentu menarik untuk di bahas mengapa

baru sekarang seorang perempuan bisa memenangkan kursi Bupati dalam kontestasi pilkada Jombang. Di tengah stereotipe masyarakat yang masih banyak menganggap bahwa seorang pemimpin haruslah seorang laki – laki terlebih di Kabupaten Jombang yang di juluki sebagai “Kota Santri” karena banyaknya pondok pesantren dan juga sebagian besar penduduknya terkenal sebagai pemeluk Islam yang kuat.

Strategi yang tepat tentu dipersiapkan oleh pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah sehingga bias menarik suara masyarakat agar memilih mereka. Selain itu pasangan Mundjidah Wahab dan Sumrambah juga harus memiliki akumulasi modal ekonomi, politik dan sosial yang mumpuni untuk dapat menarik perhatian dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dalam hal ini peneliti melihat adanya pemanfaatan modal – modal yang telah disebutkan pada Pilkada Kabupaten Jombang 2018. Dengan berbagai data dan fenomena yang didapat dan diamati oleh peneliti maka peneliti memutuskan untuk memilih Kabupaten Jombang menjadi *locus* penelitian ini.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data berarti bahwa dalam suatu penelitian, peneliti juga harus mencatat dokumen – dokumen yang didapat, informasi, dan peristiwa pada saat penelitian dilakukan. Terutama bagi penelitian – penelitian dalam ilmu – ilmu sosial data memegang peranan penting yang akan digunakan untuk mendukung penjabaran analisis dalam pembahasan tentang permasalahan penelitian yang akan dibahas oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data atau informasi terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang bisa digunakan oleh peneliti. Dalam penelitian kualitatif teknik yang banyak digunakan untuk memperoleh informasi dan data adalah melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi dan pengumpulan dokumen.³⁵ Dalam penelitian ini hanya menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan pengumpulan dokumen saja, karena untuk observasi tidak lagi dapat dilakukan karena tidak lagi dalam waktu kejadian.

³⁵ Log. Cit.

Sebagaimana sudah dijelaskan diatas bahwa penelitian kualitatif lebih mengutamakan data yang diperoleh dari proses wawancara yang dilakukan dengan responden yang telah dipilih. Berikut adalah beberapa tipe atau cara yang dapat dilakukan untuk memperoleh informasi dalam penelitian kualitatif.

1.8.1 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan atau pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan langsung bertemu dan bertatap muka dan melakukan tanya jawab langsung dengan responden atau sumber data. Dimana Wawancara sendiri diartikan sebagai proses tatap muka antara periset dengan responden, dimana hasil yang dihasilkan dari proses wawancara tersebut akan dijadikan data mentah yang kemudian akan diolah oleh periset. Dari definisi tersebut kita juga dapat mengetahui bahwa tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium.³⁶ Dimana jika sebagai metode primer, data yang diperoleh dari proses wawancara dengan responden merupakan data yang utama yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sedangkan sebagai kriterium, wawancara hanya digunakan untuk menguji kebenaran dan kemapatan data yang diperoleh dengan data dari metode lainnya. Wawancara yang dilakukan juga memiliki manfaat, salah satunya adalah dapat memfasilitasi kemampuan peneliti selaku pengumpul data untuk mendapatkan informasi yang tidak tercantum dalam dokumen atau catatan tertulis. Sehingga informasi yang didapatkan oleh periset merupakan informasi yang didapatkan secara langsung.³⁷

Wawancara dapat dilakukan secara teratur dan terstruktur maupun tidak teratur dan terstruktur dan dapat dilakukan melalui tahap tatap muka langsung

³⁶ Sutrisno Hadi, "Metodologi ResearchII", (Yogyakarta : Andi Offset, 1992).

³⁷ Isa Harrison, Metodologi Penelitian Politik, (Jakarta : Kencana, 2007).

maupun melalui media lain seperti berkomunikasi melalui telepon. Untuk wawancara terstruktur sendiri merupakan wawancara yang dilakukan dengan pedoman yang telah dipersiapkan terlebih dahulu secara sistematis dan lengkap, selain itu peneliti yang bertindak sebagai pengumpul data juga telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang akan diperolehnya. Berbeda dengan wawancara tidak terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan dengan tidak mempersiapkan pedoman wawancara secara sistematis dan lengkap dan bisa saja muncul pertanyaan tanpa adanya perencanaan sebelumnya.

1.8.2 Observasi

Observasi adalah pengamatan dan juga pencatatan atau proses pendokumentasian informasi yang didapatkan pada saat peneliti turun ke lapangan untuk mendapatkan data secara langsung. Observasi yang dilakukan adalah penelitian terhadap responden atau subjek penelitian. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk membantu peneliti dalam melakukan analisis data. Selain itu dengan teknik ini juga akan membantu peneliti dengan mencatat langsung tanpa adanya ketergantungan kepada pihak lain. Selain itu observasi juga akan memberikan informasi yang memang tidak didapatkan di dalam teknik pengumpulan data lainnya. dan tujuan dari teknik observasi sendiri adalah untuk membantu peneliti dalam menganalisis data lebih lengkap.³⁸

1.8.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan, pengumpulan, penyimpanan hasil dari observasi atau hasil dari pengumpulan data lainnya yang menunjang penelitian ini. Dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah berupa alat perekam suara, kamera atau yang sarana yang lain yang dapat menunjang pendokumentasian proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti.

³⁸ Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta : Kencana, 2007).

1.9 Jenis Data

Di dalam penelitian ini, sumber hasil data dapat terbagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder.

3. Data Primer

Merupakan data yang didapatkan melalui informan atau responden selaku subjek penelitian. Dimana di dalam mendapatkan data ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada informan atau responden.

4. Data Sekunder

Merupakan data yang didapatkan melalui kumpulan – kumpulan data atau dokumen tertulis yang didapatkan peneliti dari pihak – pihak lainnya. Data ini bisa diperoleh melalui studi literature seperti buku, jurnal, berita, penelitian, skripsi lainnya, maupun dari thesis sebelumnya. Yang mana data yang diperoleh akan memperkuat temuan data sebelumnya yang telah diperoleh oleh peneliti.

1.10 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan suatu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dan sederhana. Proses penyederhanaan data tersebut terdiri atas catatan lapangan, hasil rekaman dan dokumen – dokumen yang disusun dan dikategorikan sehingga mudah untuk diinterpretasikan dan dipahami.³⁹ Menurut Creswell analisis data merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan membutuhkan refleksi terus – menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan – pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksudnya adalah analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, interpretasi, dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama – sama.⁴⁰

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif tanpa mengabaikan data yang bersifat kuantitatif. Sebelum menjelaskan mengenai teknik analisis data yang akan dipakai oleh penulis dalam penelitian ini akan dijelaskan terlebih dahulu dijelaskan mengenai tujuan dari

³⁹ *Ibid.* Robert K. Yin, hlm. 103.

⁴⁰ Loc, Cit. Creswell. Hal 274

adanya analisis data itu tersendiri. Dimana analisis data Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Teknis analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah – milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴¹

Dalam penelitian ini data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan berdasarkan data yang didapatkan dari dokumen yang telah diseleksi dan diklarifikasi sesuai dengan kebutuhan data dan kemudian dianalisis menurut kemampuan penulis dan sesuai dengan metode kualitatif melalui interpretasi etik dan emik. Interpretasi etik adalah pandangan dari peneliti sendiri mengenai data yang dianalisis, sedangkan interpretasi emik adalah pandangan informan mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Lalu kedua macam informasi ini kemudian diolah dan dianalisis oleh peneliti dengan pengetahuan yang berpedoman pada paradigma, teori – teori, pendapat – pendapat ilmiah yang menunjang dengan apa yang telah disampaikan oleh informan tentunya disertai dengan literatur yang ada.

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua adalah pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil proses wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga dilakukan setelah dua hal tersebut dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah responden yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait dengan masalah yang diangkat. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang akan dijadikan objek penelitian. Kemudian tahapan yang terakhir adalah analisis data

⁴¹ Bogdan Robert C. dan Biklen Kopp Sari, "Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods," (London : Allyn and Bacon, Inc, 1982).

dalam rangka menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis triangulais (gabungan).